



**STRATEGI PENINGKATAN PERAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP  
PEREKONOMIAN WILAYAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**TESIS**

**Oleh**

**FERI ZAINUR ROFIQ**

**NIM 130820201022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**STRATEGI PENINGKATAN PERAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP  
PEREKONOMIAN WILAYAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**STRATEGY FOR INCREASING ROLE OF FISHERIES SECTOR TO THE  
ECONOMY REGION OF SITUBONDO REGENCY**

Oleh

**FERI ZAINUR ROFIQ**

**NIM 130820201022**

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Zainur Rofiq

NIM : 130820201022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “**Strategi Peningkatan Peran Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten Situbondo**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2015

Yang menyatakan,

Feri Zainur Rofiq

NIM 130820201022

**TESIS**

**STRATEGI PENINGKATAN PERAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP  
PEREKONOMIAN WILAYAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**STRATEGY FOR INCREASING ROLE OF FISHERIES SECTOR TO THE  
ECONOMY REGION OF SITUBONDO REGENCY**

Oleh

**FERI ZAINUR ROFIQ**

**NIM 130820201022**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. I Wayan Subagiarta M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Regina Niken Wilantari S.E., M.Si

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Tesis : Strategi Peningkatan Peran Sektor Perikanan  
Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten  
Situbondo  
Nama : Feri Zainur Rofiq  
NIM : 130820201022  
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah  
Disetujui untuk diuji :

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. I Wayan Subagiarta M.Si  
NIP. 19600412 198702 1 001

Pembimbing Anggota

Dr. Regina Niken Wilantari, SE, M.Si

NIP. 19740913 200112 2 001

Mengetahui/Menyetujui

Pascasarjana Universitas Jember  
Program Magister Ilmu Ekonomi  
Ketua Program Studi

Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si

NIP. 19710610 200112 2 002



**PENGESAHAN**

**JUDUL TESIS**

**STRATEGI PENINGKATAN PERAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP  
PEREKONOMIAN WILAYAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Feri Zainur Rofiq  
NIM : 130820201022  
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si  
NIP. 19710610 200112 2 001 .....
2. Sekretaris : Dr. Zainuri, M.Si  
NIP. ....
3. Anggota I : Dr. Lilis Yuliati, SE, M.Si  
NIP. ....
4. Anggota II : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si  
NIP. 19600412 198702 1 001 .....
5. Anggota III : Dr. Regina Niken Wilantari, SE, M.Si  
NIP. 19740913 200112 2 001 .....

Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si

NIP. 19630614 199002 1 001

Strategi Peningkatan Peran Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten  
Situbondo

**Feri Zainur Rofiq**

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pengembangan sector perikanan di Kabupaten Situbondo. Dari penelitian ini diketahui bahwa sector perikanan di Kabupaten Situbondo masih sangat berpotensi. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 150 km, perikanan budidaya dan perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk dikembangkan dalam meningkat kesejahteraan masyarakat Situbondo. Pada penelitian ini kami menggunakan analisa *shift share*, sub-sektor perikanan menempati posisi kedua yang merupakan sub sector unggulan di Situbondo dan pertumbuhan sub-sektor perikanan hanya sebesar 11,42% per tahun. Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP), peran pemerintah merupakan peran kunci yang dibutuhkan bagi pengembangan sector perikanan di Situbondo untuk lebih berkembang lagi, berdasarkan penelitian ini, pembangunan sarana dan prasarana perikanan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para pengusaha di bidang perikanan, peningkatan investasi dan kemitraan oleh sektor swasta serta peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada nelayan.



**Kata Kunci: Potensi Sektor Perikanan, Situbondo, Analisa Shift Share, Analytic Hierarchy Process (AHP)**

---



Strategy For Increasing Role Of Fisheries Sector To The Economy Region Of Situbondo  
Regency

**Feri Zainur Rofiq**

Master of Economics, Faculty of Economics, University of Jember

**ABSTRACT**

The aim of this research was to find the development strategy of fisheries sector in Situbondo Regency. Having more than 150 km coastline, the result showed that Situbondo had a huge potential fisheries sector, by developing the aquaculture fisheries and wild fisheries, in order to increase the social welfare. Based on the *shift share analysis*, the fisheries sub-sector was in the second sub sector priority in Situbondo, and the growth was 11,42%. Besides, by the *Analytic Hierarchy Process* (AHP), the government's role was the key element that was needed by the fisheries sector development in Situbondo, followed by the private sector, and the society. The development of fisheries infrastructure was conducted to be the basic needs for the entrepreneur, included the increasing of investment, partnership in private sector, and the increasing in workshop, socialization and the internship for the fisherman.

**Key Words: Potential Fisheries Sector, Situbondo, Shift Share Analysis, Analytic Hierarchy Process (AHP)**

---

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menjelang diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015, mendorong semua sektor perekonomian dan perdagangan untuk berbenah diri. Pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat Asean akan merasakan dampak perdagangan bebas dalam lingkup negara-negara Asean, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei, Myanmar, dan Filipina. ASEAN telah menyepakati sektor-sektor prioritas menuju momen tersebut. Ketika berlangsung ASEAN Summit ke-9 tahun 2003 ditetapkan 11 Priority Integration Sektors (PIS). Namun pada tahun 2006 PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12 yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Ke-7 sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan kelima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, e-asean, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Indonesia yang dinilai berhasil dalam pengembangannya, sehingga dipercaya sebagai kepala MEA Center, yang berfungsi sebagai pusat informasi dan kerjasama negara-negara Asean, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi agar tercapai harmonisasi standar produk barang dan jasa serta proses produksi di sektor kelautan dan perikanan. Isu ketahanan pangan merupakan salah satu masalah utama masyarakat di dunia, dan bagi Indonesia, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketersediaan produksi pangan. Salah satu daerah yang mempunyai potensi pengembangan produksi perikanan di Propinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Situbondo.

Kabupaten Situbondo yang berada di ujung timur pulau Jawa bagian utara memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo, terdapat 14 kecamatan yang memiliki pantai dengan bentangan dari barat ke timur sekitar 150 km pantai utara yang memiliki karakteristik berdataran rendah. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Situbondo kaya potensi sumberdaya alam yang berasal dari laut. Upaya pengembangan potensi laut ini terkait dengan usaha pemerintah daerah untuk mengangkat kelompok nelayan dari kemiskinan, selain untuk kembali menggairahkan kondisi perekonomian Situbondo secara umum. Berikut ini perbandingan PDRB atas harga konstan

pada sub-sektor perikanan tahun 2013 pada Kabupaten kota di wilayah timur provinsi jawa timur yang lebih dikenal dengan daerah “tapal kuda”.

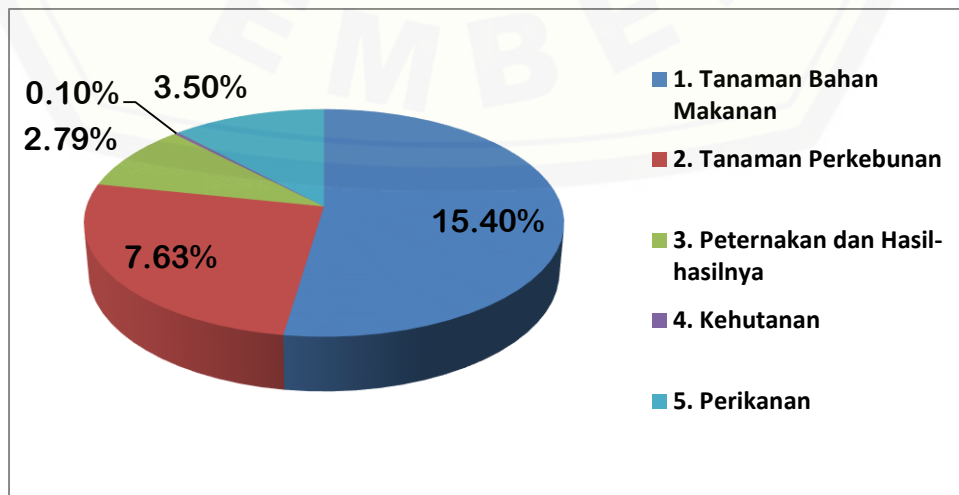
**Tabel 1.1 Perbandingan PDRB Sub-sektor Perikanan tahun 2013 di daerah timur Jawa Timur**

No	Kabupaten	PDRB sub-sektor perikanan Tahun 2013 (Rp. 000.000)
1	Probolinggo	795.470,63
2	Situbondo	411.290,15
3	Banyuwangi	2.911.625,41
4	Jember	508.876,97
5	Bondowoso	111.677,28

(Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2013 diolah)

Pada tabel 1.1 tersebut PDRB Kabupaten Probolinggo yang berdekatan dengan Kabupaten Situbondo lebih besar hampir dua kali lipat, jauh di bawah Kabupaten Banyuwangi sedangkan PDRB Kabupaten Jember Hampir sama walaupun lebih tinggi.

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 Kabupaten Situbondo hanya menyumbangkan 3,50% dari kontribusi sektor pertanian yang sebesar 29,42% terhadap PDRB Kabupaten Situbondo. berikut ini peran sub-sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2013 di Kabupaten Situbondo:



(Sumber: Situbondo Dalam Angka 2013 diolah)

## **Gambar 1.1 Peran Sub-Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013**

Selain itu berdasarkan data Situbondo Dalam Angka Tahun 2014, jumlah nelayan di Kabupaten Situbondo sebanyak 11.566 orang dan jumlah armada perikanan yang sejumlah 2.454 unit dirasa relatif kecil jika dibandingkan dengan 150 km garis pantai, oleh karena itu, sektor perikanan kurang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan jika tidak direncanakan, dikelola dan dikembangkan dengan baik. Jumlah keluarga pra-sejahtera sebanyak 67.913 keluarga atau 29% terhadap keseluruhan keluarga dengan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3,31 pada tahun 2013.

Dalam menghadapi pasar bebas, salah satu hal yang paling sulit dihindari adalah persaingan yang semakin tajam. Hal ini dikarenakan persaingan dalam sektor perikanan bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Meskipun negara-negara lain banyak mengadopsi teknologi budidaya yang dipakai oleh Indonesia, bukan tidak mungkin negara pengadopsi akan mengimplementasikannya jauh lebih baik daripada Indonesia. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan penerapan SNI melalui sertifikasi mendesak untuk dilakukan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah aspek sumber daya manusia, pembiayaan, pemasaran, dan regulasi dari unsur teknis pemerintah yang harus dipersiapkan juga oleh *stakeholder* terkait.

Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan era perdagangan yang baru untuk wilayah Asean, khususnya pada *stakeholder* di sektor perikanan, tidak lepas dari peran satuan kerja pemerintah dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut beserta seluruh *stakeholder*, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan, pelatihan yang diberikan, dukungan teknologi informasi, sektor swasta dan pelaku usaha itu sendiri termasuk masyarakat.

Dengan potensi yang begitu besar dan dukungan semua pihak yang terkait dalam usaha perikanan maka sektor perikanan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dalam meningkatkan hasil dari Sumber Daya Perikanan yang begitu besar ini.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sektor perikanan merupakan sektor Potensial di Kabupaten Situbondo ?

2. Bagaimana alternative Strategi Pengembangan Perikanan Di Kabupaten Situbondo ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sektor perikanan termasuk sektor Potensial apa bukan di Kabupaten Situbondo
2. Mengetahui alternatif Strategi Pengembangan Perikanan Di Kabupaten Situbondo

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah  
Sebagai bahan kajian dalam menentukan kebijakan di sector perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dan jug adapt menentukan prioritas strategis manakah yang akan diambil dan dijalankan terkait dengan pengembangan sector perikanan di Kabuoaten Situbondo.
2. Bagi Akademisi
  - a. Sebagai referensi dalam melakukan studi-studi di bidang pengembangan wilayah terutama dalam hal perikanan.
  - b. Sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan hasil yang lebih sempurna

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu sasaran pembangunan. Pembangunan dalam arti luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali dengan pendapatan riil perkapita (Irawan dan Suparmoko, 1997). Selanjutnya, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena peningkatan pendapatan merupakan penerimaan yang dapat menimbulkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laju pembangunan ekonomi suatu negara diukur dengan menggunakan tingkat pertumbuhan GDP/GNP (Arsyad, 1997).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sularso dan Restianto, 2011). Todaro (1997) dalam Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemerintah daerah bersama *stakeholder* lainnya harus selalu meningkatkan investasi ke sektor-sektor produktif, dengan cara meningkatkan alokasi pada belanja modal, serta meningkatkan kualitas dalam kegiatan ekonomi daerah. Arsyad (2004) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP), yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau terjadi tidaknya perubahan struktur ekonomi. PDRB didefinisikan sebagai nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah tertentu dalam satu tahun. Nilai PDRB diperoleh dengan menghitung nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi, yaitu dengan mengalihkan kuantum nilai produksi dengan harga dikurangi dengan biaya yang ikut serta dalam proses produksi (*intermediate cost*).

Berdasarkan Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C (2004) lima pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi, yaitu : Teori tahapan linier dan pembangunan sebagai pertumbuhan; model perubahan struktural; revolusi ketergantungan internasional;

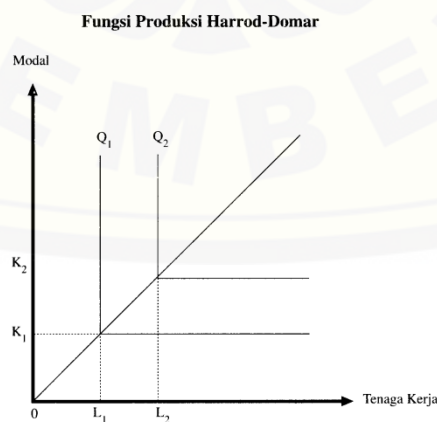
kontrarevolusi neoklasik dan teori pertumbuhan baru. Model Pertumbuhan Harold-Domar atau sering disebut model pertumbuhan AK termasuk dalam teori tahapan linear.

### 2.1.1. Teori Pertumbuhan Model Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu:

- a) Perekonomian dalam keadaan *full employment* dan barang-barang modal digunakan secara penuh.
- b) Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c) Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional
- d) Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*Capital-Output Ratio* atau COR) dan rasio pertambahan modal-output (*Incremental Capital-Output Ratio* atau ICOR)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Lincolyn, 2004).



Gambar 2.1

Hubungan tersebut yang kita kenal dengan istilah modal-output ratio (COR) yaitu 3 berbanding 1. Jika kita menetapkan  $COR = k$ , rasio kecenderungan menabung (MPS) =  $s$



yang merupakan proporsi tetap dari output total, dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan.

## 2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu (Mankiw:2000). Dalam teori ini perkembangan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang eksogen. Hubungan antara output, modal dan tenaga kerja dapat ditulis dalam bentuk fungsi sebagai berikut.

$$y = f(k) \dots\dots(1)$$

Dari persamaan (1) terlihat bahwa output per pekerja ( $y$ ) adalah fungsi dari *capital stock* per pekerja. Sesuai dengan fungsi produksi yang berlaku hukum “the law of deminishing return”, dimana pada titik produksi awal, penambahan kapital per labor akan menambah output per pekerja lebih banyak, tetapi pada titik tertentu penambahan *capital stock* per pekerja tidak akan menambah output per pekerja dan bahkan akan bisa mengurangi output per pekerja.

Sedangkan fungsi investasi dituliskan sebagai berikut.

$$i = s f(k) \dots\dots(2)$$

Dalam persamaan tersebut, tingkat investasi per pekerja merupakan fungsi *capital stock* per pekerja. *Capital stock* sendiri dipengaruhi oleh besarnya investasi dan penyusutan dimana investasi akan menambah *capital stock* dan penyusutan akan menguranginya.

$$\Delta k = i - \gamma kt \dots\dots\dots(3),$$

Dimana ;  $\gamma$  adalah porsi penyusutan terhadap *capital stock*

Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan *capital stock* dan akan meningkatkan pendapatan sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tetapi dalam kurun waktu tertentu pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan jika telah mencapai apa yang disebut *steady-state level of capital*. Kondisi ini terjadi jika investasi sama dengan penyusutan sehingga akumulasi modal.

Selain tingkat tabungan, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi lebih bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Populasi meningkatkan jumlah labor dan dengan sendirinya akan mengurangi *capital stock* per pekerja. Tingkat pertumbuhan populasi dan tingkat penyusutan secara bersama-sama akan mengurangi *capital stock*.

Pengaruh pertumbuhan populasi secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.

$$\Delta k = sf(k) - (\gamma + n) kt, \dots\dots\dots(4)$$

dimana n adalah tingkat pertumbuhan populasi.

Dalam teori ini diprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi akan memiliki GDP perkapita yang rendah (Mankiw, 2000).

Kemajuan teknologi dalam teori Solow dianggap sebagai faktor eksogen. Dalam perumusan selanjutnya fungsi produksi adalah  $Y = f(K, L, E)$ , dimana E adalah efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya  $y$  adalah  $Y/LE$  dimana LE menunjukkan jumlah tenaga kerja efektif. Pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap perubahan modal dapat dirumuskan sebagai

$$\Delta k = sf(k) - (\gamma + n + g) kt, \dots\dots\dots(5)$$

dimana g menggambarkan kemajuan teknologi melalui efisiensi tenaga kerja. Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan karena mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja yang terus tumbuh. (Mankiw, N. Georgy. 2000)

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per tenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. (Mankiw, N. Georgy. 2000)

### 2.1.3. Teori Pertumbuhan Endogen

Model pertumbuhan endogen ini menyajikan sebuah kerangka teoritis yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Teori Pertumbuhan endogen ini dipelopori Paul M Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988 sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik solow yang tidak bisa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pemahaman ini adalah respon dari perkembangan teknologi seperti kita lihat sekarang yang mampu menghasilkan teknologi modern sehingga dapat meningkatkan produksi. Sedangkan teori Neo-klasik solow tidak dapat menjelaskan dengan baik tentang perkembangan teknologi (Tarigan, Robinson.2005)

Teori pertumbuhan endogen ini berbeda dengan teori Solow yang menganggap keseimbangan jangka panjang dari capital-labor ratio akan menghasilkan pertumbuhan

mendekati zero growth (konvergen). Model pertumbuhan endogen ini berasumsi proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri memproduksi dengan skala hasil yang konstan, sesuai dengan asumsi persaingan sempurna. Romer berasumsi bahwa cadangan modal dapat mempengaruhi output ditingkat industri sehingga memungkinkan terjadinya skala hasil yang makin meningkat ditingkat perekonomian secara keseluruhan. Cadangan modal yang dimiliki setiap perusahaan termasuk pengetahuan yang dimilikinya juga (Tarigan, Robinson .2005)

Pengetahuan yang terdapat dalam cadangan modal setiap perusahaan adalah sebuah barang publik (public goods) (seperti produktivitas tenaga kerja pada model Solow). Kemajuan teknologi dianggap hal yang bersifat endogen., dan pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Selain itu pengertian modal disini bersifat lebih luas, bukan hanya sekadar modal fisik tetapi juga mencakup modal insani (*human capital*).

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasikal dari Solow, dan teori pertumbuhan baru atau teori Endogen oleh Romer maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni: 1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru, 2) pertumbuhan penduduk dan 3) kemajuan teknologi.

Faktor-faktor yang dianggap sebagai sumber penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 1994) antara lain: 1) Tanah dan Kekayaan lainnya, 2) Jumlah, Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja, 3) Barang Modal dan Tingkat Teknologi, 4) Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat dan 5) Luas Pasar dan Sumber Pertumbuhan

Menurut Kuznets (dalam Jinghan, 1993) memberikan enam ciri pertumbuhan yang muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, dimana ciri ciri tersebut seringkali terkait satu sama lain dalam hubungan sebab akibat. Keenam ciri tersebut adalah 1) Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan produk per kapita yang tinggi, 2) Peningkatan produktifitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk perkapita, 3) Laju perubahan struktural yang tinggi yang mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif dan peralihan dari usaha-usaha perseorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh, 4) Semakin tingginya tingkat urbanisasi, 5) Ekspansi dari negara lain dan 6) Peningkatan arus barang, modal dan orang antar bangsa.

## 2.1.4 Teori pertumbuhan Jalur Cepat (Turnpike)

Teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*) diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955 (Tarigan, 2005 : 54). Inti dari teori ini adalah menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa diekspor (keluar daerah atau luar negeri). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. menggabungkan kebijakan jalur cepat (*turnpike*) dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

selain itu, peningkatan jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat juga perlu diperhatikan untuk penambahan usaha baru dan perluasan usaha untuk menyerap angkatan kerja yang semakin bertambah tiap tahun.. Jiwa usaha berarti pemilik modal mampu melihat peluang dan mengambil resiko untuk membuka lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja (Tarigan, 2005: 54)

## 2.1.5 Tahapan Proses Pembangunan Ekonomi

Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut WW. Rostow

### 1. Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Tahap tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang didalam fungsi produksi yang terbatas, dalam artian masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi yang relatif masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh pemikir yang tidak rasional, tetapi oleh kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus.

Menurut Rostow dalam masyarakat tradisional ini produksi perkapita masih sangat terbatas dan sumber daya produksi utama adalah sektor pertanian, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk mengadakan mobilitas vertikal dikarenakan kedudukan masyarakat tidak akan jauh berbeda dengan kedudukan ayahnya dan sistem mobilitasnya umumnya berdasarkan sistem warisan (pemberian).

### 2. Prasyarat untuk Lepas Landas (*The Precondition for Take Off*)

Tahap prasyarat lepas landas ini adalah masa transisi dimana ketika suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya, atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Tahap prasyarat lepas landas ini dibagi menjadi dua tipe oleh Rostow. Yang pertama adalah tahap yang dilakukan dengan mengubah masyarakat tradisional yang telah ada, sedangkan yang kedua adalah *brown free* yaitu Amerika, Kanada, Australia, Selandia baru, dimana mereka tidak perlu merubah sistem tradisional dikarenakan masyarakat itu terdiri dari imigran-imigran yang diperlukan sebagai tahap masa prasyarat lepas landas.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada Tahap Prasyarat untuk Lepas Landas antara lain: pertama adalah Pembangunan merupakan sebuah Perubahan yang Bersifat Multidimensi, sebagaimana telah dinyatakan Rostow bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks dan saling berhubungan. Misalnya saja argumen yang mengatakan bahwa tabungan akan mempercepat pembangunan, hal itu tentunya tidak akan terlaksana jika perubahan tersebut tidak diikuti oleh perubahan lain dalam masyarakat, misalnya saja cara penggunaan tabungan dengan sebaik baiknya. Karena jika ditelaah secara multidimensi maka akan terjadi hubungan yang kompleks, misalnya tabungan akan mempercepat pembangunan melalui investasi dan tentunya akan terciptanya sarana dan prasarana umum, peningkatan kualitas pendidikan dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi dan sosial.

Yang Kedua adalah Perombakan Struktur Ekonomi, struktur ekonomi ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, sehingga kemajuan dalam bidang pertanian, pertambangan, dan sebagainya harus diiringi dengan penanaman modal. Sehingga di negara pra landas ini untuk berkembang maka dibutuhkan sistem pertanian, pertambangan yang matang dan kemudian seiring perkembangannya yang memerlukan pengolahan bahan mentah maka akan didirikan pabrik yang mengolah bahan-bahan tersebut.

Yang ketiga adalah Peran Sektor Pertanian, Kemajuan pertanian ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan bagi penduduk yang bertambah; dan agar penduduk kota yang banyak akibat industrialisasi itu dapat memperoleh bahan makanan yang cukup. Selain itu sektor pertanian yang surplus akan diekspor sebagai modal untuk membeli alat-alat produksi yang mendukung industrialisasi.

Yang Keempat Peran Sektor Prasarana, Rostow berpendapat bahwa pada tahap transisi ini memerlukan banyak modal yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana (infrastruktur). Prasarana mempunyai tiga ciri krusial diantaranya, masa antara pembangunan dan pematangan hasil pembangunan sangat panjang, pembangunan memerlukan biaya yang besar, dan manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Selanjutnya yang terakhir adalah Ciri Kepemimpinan, Rostow menganalisis bahwa dalam tahap ini pemerintahan dalam masyarakat akan lebih teratur dan suatu golongan elit harus tercipta guna untuk mencapai masyarakat industri. Rostow juga menambahkan bahwa masyarakat dunia transisi ini kan berkembang jika mendapat tekanan dari negara-negara maju, karena sangat sulit sekali berkembang jika hanya dipengaruhi secara internal saja.

### 3. Lepas Landas (*The Take Off*)

Dalam tahap lepas landas merupakan berlangsungnya perubahan yang besar dan drastis dalam masyarakat misalnya, revolusi politik, revolusi ekonomi ataupun perkembangan inovasi-inovasi teknologi dan output produksi. Adapun ciri-ciri tahap lepas landas adalah sebagai berikut: 1) Terwujudnya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari lebih kurang 5% menjadi 10% dari produk nasional bruto. 2) Terjadi peningkatan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi. 3) Adanya platform politik, sosial, dan intitusional baru yang akan menjamin berlangsungnya, segala tuntutan perluasan sektor modern dan potensi ekonomi ekstern.

### 4. Gerakan Kearah Kedewasaan (*The Drive to Maturity*)

Gerakan Kearah kedewasaan ini disebut juga masa sesudah lepas landas, dimasa ini masyarakat sudah mulai efektif menggunakan teknologi modrn pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Dalam tahap ini sektor pelopor baru akan menggantikan pelopor lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor primer dalam tahap ini ditentukan oleh teknologi, kekayaan alam dan juga kebijakan pemerintah.

Dalam menganalisis ciri-ciri tahapan ini, rostow menekankan penelaahannya pada coran perubahan sektor pelopor industri di berbagai nega maju dan ia menunjukkan bahwa setiap negara memiliki perbedaan disetiap jenis sektor pelopornya, misalnya jika Inggris industri tekstil digantikan oleh industri baja, batu bara, peralatan teknik berat. Sedangkan Dijerma dan di Amerika jaringan rel kereta api digantika dengan industri baja dan industri peralatan berat.

### 5. Masa Konsumsi Tinggi (*The Age of High Massconsumption*).

Tahap terakhir dari teori pertumbuhan ekonomi rostow ini adalah tahap konsumsi tinggi, yaitu dimana perhatian masyarakat lebih menakankan kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, dan bukan lagi pada produksi sehingga coraknya lebih konsumtif. Dalam tahap ini terdapat tiga tujuan utama masyarakat yang diperebutkan dalam memperoleh sumberdaya yang tersedia dan dukungan politik, yaitu: 1) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara keluar negari dan kecenderungan ini berwujud penakhlukan negara lain. 2) Menciptakan welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata bagi

penduduk dengan cara melakukan pemerataan pendapatan dan mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat diatas konsumsi keperluan utama yang sederhana seperti, makanan, pakaian, perumahan menjadi barang tahan lama dan mewah. (Sukirno, Sadono. 1985)

## 2.2. Pembangunan Sektor Perikanan

Menurut UU Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menegaskan bahwa beberapa tujuan pengelolaan perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja. Pengelolaan sumber daya merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumber daya. Hal ini bertujuan agar sumber daya perikanan tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, seharusnya sektor perikanan menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia. Selain itu sektor perikanan juga berpotensi untuk dijadikan penggerak utama (*prime mover*) ekonomi Indonesia. Namun secara empiris pembangunan sektor perikanan selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil.

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor andalan dalam pemulihan ekonomi karena beberapa alasan antara lain : 1) Sumber daya perikanan, baik ikan, sumber daya perairan, dan lahan tambak masih cukup melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal, 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan, walaupun masih relatif kecil kontribusinya, menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, 3) Permintaan ikan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat pendidikan, 4) Pola hidup masyarakat dunia pada saat ini dicirikan dengan semakin selektifnya makanan yang disajikan dengan memenuhi kriteria gizi yang tinggi, mudah disajikan, dan menjangkau masyarakat, dan 5) jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dan mencapai lebih dari 200 juta jiwa merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk perikanan (Kusumaatmaja dalam Mudzakir 2008).

Pesatnya pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk serta menipisnya sumber daya alam di daratan, maka sumber daya kelautan dan perikanan akan menjadi salah satu harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional dimasa

mendatang. Hal ini dapat diselesaikan dengan jalan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara optimal, sehingga pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sekaligus dapat meningkat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan aspek sosial ekonomi sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan perikanan secara berkelanjutan. Keadaan ini telah mendorong kita akan kebutuhan untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir (Dahuri *et al.*, 1996).

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilasanakan selama ini dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), dan *pro-growth* (pertumbuhan). Dengan melihat potensi yang ada, pembangunan kelautan dan perikanan harusnya dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari pada keadaan sekarang. Adanya kesalahan orientasi pembangunan dan pengelolaan sumber daya menyebabkan Indonesia belum dapat mengoptimalkan manfaat dari potensi sumber daya yang ada (KKP 2010). Secara teoritis pengembangan perikanan memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Keterkaitan umum antara sumber daya perikanan, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah, dan pasar akan berpengaruh kepada GDP yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. (Soemokaryo dalam Putra 2011).

Pembangunan perikanan merupakan salah satu pembangunan sektoral yang diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja serta pembangunan nasional secara menyeluruh. Cukup berasalan jika sektor ini menjadi salah satu prioritas pembangunan karena sektor perikanan didukung oleh dua komponen utama yang menjadi tulang punggung pengembangannya, yaitu komponen biofisik dan sosial ekonomi. Komponen biofisik, perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan (potensi perikanan air tawar dan laut) yang beragam jumlahnya, dan masing-masing sumber daya tersebut memiliki nilai penting baik dari sisi pasar domestik maupun pasar internasional. Komponen sosial ekonomi, secara sosial sebagian besar penduduk Indonesia (kurang lebih 60%) hidup di wilayah pesisir (dengan pertumbuhan rata-rata 2% per tahun). Hal ini disebabkan secara administratif sebagian besar kota dan kabupaten terletak di kawasan pesisir. Implikasi dari sisi ekonomi, industri kelautan dan perikanan menjadi andalan sektoral yang menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja secara langsung (PKSPL 2002).

Namun disisi lain, pembangunan perikanan secara umum mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain : 1) miskinnya masyarakat pada kawasan usaha perikanan, 2)



kemampuan sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat kurangnya sentuhan pendidikan formal walaupun kaya dengan pengetahuan tradisional, 3) sumber daya alam hayati tidak dimanfaatkan secara efisien dan efektif, 4) lingkungan laut maupun daratnya mengalami kerusakan serius, dan 5) kesenjangan pembangunan selama ini antara pembangunan berbasis lautan dan daratan (Dahuri 2003).

Pengelolaan sektor perikanan masih terjadi tumpang tindih kebijakan yang seringkali menimbulkan konflik kewenangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan wilayah-wilayah perikanan ditangani lebih dari satu instansi dan kewenangan terpisah yang tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda. Padahal hubungan ekologis-biologis dan ekonomi daerah pesisir, pantai dan laut saling terkait satu dengan yang lainnya. Kurangnya koordinasi antar pelaku pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan sektor perikanan yang dilakukan secara sektoral oleh masing-masing pihak. Penyebab lemahnya koordinasi diakibatkan oleh belum adanya sistem atau lembaga yang mampu mengkoordinasikan setiap kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan. Akibatnya sektor perikanan yang memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang dengan sektor-sektor perekonomian lainnya tidak tumbuh dan berkembang secara optimal (Dahuri 2003).

Produksi ikan nasional lebih dari 90% disumbangkan oleh nelayan dan petani ikan tradisional (nelayan dengan perahu tanpa motor dan petani ikan dengan budidaya tradisional dengan tingkat pendidikan mereka 95% paling tinggi lulusan SD). Kondisi ini menyebabkan antara lain; pertama, fakta yang dihadapi dalam pengembangan masyarakat nelayan dan petani ikan pada tingkat *“bargaining position”* yang lebih rendah dibandingkan dengan kepentingan kelembagaan atau kepentingan lainnya. Kedua, minat investasi sektor-sektor perikanan dibandingkan dengan sektor lainnya rendah. Akibat yang terasa adalah aliran kapital, inovasi teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan, sinergi internasional bidang informasi dan seterusnya lebih mengalir ke sektor lain. Ketiga, hilangnya dinamika dan etos *“kepesisiran”* dan *“kebaharian”*, sehingga perhatian pemerintah terhadap usaha peningkatan kesejahteraan bagi nelayan atau petani ikan menjadi kurang bahkan terkesan tertinggal dan ditinggalkan (Damanhuri 2000).

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Meitha Konita Kaihatu (2013) dengan judul penelitian *“Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Mendukung Perekonomian Wilayah Kabupaten Maluku Tengah”* yang bertujuan untuk Megidentifikasi dan Menganalisis kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah kabupaten Maluku Tengah, Mengetahui basis

ekonomi sector perikanan dalam perekonomian wilayah kabupaten Maluku Tengah, Menganalisis pola dan struktur pertumbuhan kabupaten Maluku Tengah. Mengetahui tingkat konsentrasi dan spesialisasi kegiatan sector perikanan dalam perekonomian kabupaten Maluku Tengah, Merumuskan alternative strategi pengembangan sector perikanan kabupaten Maluku Tengah. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis *Shift Share*, *Location Quointent (LQ)* Analisis Tipologi Klassen, Analisis Aglomerasi, Analisis Spesialisasi dan Analisis SWOT.

Perhitungan nilai kontribusi, nilai LQ, tipologi ekonomi nilai aglomerasi, nilai spesialisasi sector perikanan di Kabupaten Maluku Tengah diperoleh Hasil Bahwa kontribusi sector perikanan atas dasar harga berlaku dan harga konstan menempatkan sector perikanan pada urutan. Peringkat kelima dan keenam dalam pembentukan PDRB. Sector perikanan di Kabupaten Maluku Tengah bukan merupakan sector basis dengan pola dan struktur ekonomi yang sedang bertumbuh namun berada pada kondisi relative tertinggal dengan tingkat lokalisasinya yang umumnya menyebar. Alternative strategi pengembangan sector perikanan yang diperoleh adalah pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui konsentrasi dan spesialisasi kegiatan pembangunan perikanan, serta mengefektifkan kegiatan promosi investasi untuk meningkatkan kontribusi, pendapatan perkapita, dan mempercepat pertumbuhan sector perikanan.

Pusparani Rianti (2013), penelitian yang berjudul “Analisis Peraan Subsektor Perikanan Terhadap Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di kabupaten Blitar”. Salah satu daerah di Jawa Timur yang perikanannya cukup potensial adalah Kabupaten Blitar. Potensi perikanan di Kabupaten Blitar meliputi perikanan laut dan perikanan darat yang di budi dayakan berupa ikan konsumsi dan ikan hias. Meskipun perikanan di Kabupaten Blitar bukan sumber pendapatan yang utama, tetapi perikanan Kabupaten Blitar mempunyai potensi yang menjanjikan dan merupakan salah satu penyumbang dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tetapi dalam subsektor perikanan masih terdapat beberapa kendala yaitu mengenai anggaran APBD yang sedikit, teknologi dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak sejalannya kenaikan produksi dan ketersediaan anggaran dan menganalisis peranan subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menghitung nilai kontribusi, nilai LQ dan nilai shift share.

Dari penelitian ini didapatkan hasil, anggaran APBD, teknologi dan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Blitar. Ketika jumlah anggaran

APBD yang didapat banyak, ditunjang oleh teknologi canggih dan sumber daya manusia yang baik maka PDRB Kabupaten Blitar juga akan meningkat. Menurut perhitungan, sektor basis di Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian, yang disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian. Subsektor perikanan Kabupaten Blitar sendiri merupakan subsektor basis kedua setelah subsector peternakan.

Penelitian Danna Idris (2014) yang berjudul “Strategi Peningkatan Peran Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Wilayah Provinsi Banten”. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengkaji apakah sektor perikanan mampu menyerap tenaga kerja di Provinsi Banten, 2) Mengkaji strategi pengembangan sektor perikanan agar dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. Alat analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah analisis sektor unggulan, analisis input output, dan analisis model ekonometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan, yang terlihat dari analisis sektor unggulan dan analisis input output.

Berdasarkan analisis sektor basis, sektor perikanan menjadi sektor basis di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dari delapan wilayah di Provinsi Banten, lima wilayahnya memiliki keunggulan komparatif pada sektor perikanan, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Berdasarkan analisis tabel input output tahun 2010, sektor perikanan di Provinsi Banten bukan merupakan unggulan. Hal ini terlihat dari struktur permintaan dan penawaran, struktur output, nilai tambah bruto dan permintaan akhir, sektor perikanan termasuk urutan dalam kelompok yang rendah. Namun dari komposisi nilai tambahnya, sektor perikanan termasuk sektor yang relatif menguntungkan, hal ini terlihat dari surplus usaha yang cukup besar dan melebihi rata-rata surplus usaha semua sektor ekonomi di Provinsi Banten.

Dari sisi keterkaitan, sektor perikanan masih memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya walaupun sangat kecil. Dari analisis multiplier, walaupun termasuk urutan dalam kelompok yang nilainya rendah, sektor perikanan memiliki multiplier terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja. Berdasarkan analisis model ekonometrik pertama, dapat disimpulkan bahwa apabila jumlah kapal perikanan ditambah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerjanya, yang tentunya akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran. Sedangkan pada model kedua, dapat disimpulkan bahwa apabila jumlah unit pengolahan ikan ditambah maka akan meningkatkan nilai PDRB sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan sektor basis di sebagian kabupaten/kota di Provinsi Banten, tetapi bukan merupakan sektor unggulan. Namun demikian, sektor perikanan di Provinsi Banten

mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan menambah jumlah kapal perikanan. Selain itu penambahan dan pengembangan unit pengolahan ikan di Provinsi Banten dapat meningkatkan nilai PDRB sektor perikanan.

Penelitian Anna kartina Ngamel dan Ida I Dewa Ayu Raka Susanti (2013) yang Berjudul “Peranan Sektor Kelautan dan Perikanan daam pembangunan wilayah Kota Tual, Provinsi Maluku”. Penelitian ini bertujuan untuk bahaimana nilai kontribusi sector kelautan dan perikanan terhada pembentuka Produk Domestik Regional Bruto, untuk mengetahui basis ekonomi di Kota Tual, Maluku dan memberika alternative strategi pembangunan sector kelautan dan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menghitung nilai kontribusi, nilai LQ, nilai shift share dan menggunakan analisis SWOT.

Dari Penelitian ini didapatkan hasil Berdasarkan hasil analisis *shift share*, besarnya nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap *PDRB* di Kota Tual selama periode lima tahun pasca pemekaran wilayah yaitu tahun 2008-2012, menunjukkan nilai terbesar dibanding sector perekonomian lainnya. Sektor kelautan dan perikanan di Kota Tual berdasarkan hasil perhitungan analisis *LQ* merupakan sektor basis ekonomi, Penilaian terhadap analisis *SWOT* dalam memilih alternatif strategi pengembangan sector kelautan dan perikanan yang menjadi prioritas utama di Kota Tual, adalah: a) Meningkatkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha perikanan dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; b) Pengembangan manajemen professional dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; c) Pengembangan sistem *MCS (Monitoring, Controlling and Surveillance)* secara baik dan benar oleh instansi terkait kegiatan perikanan.

Penelitian Siska Magnawati (2010) yang Berjudul “Strategi dan peranan Subsektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Wilayah Kota Serang”. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui keragaan perikanan tangkap di Kota Serang, 2) Mengetahui kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap PDRB dan kesempatan kerja di Kota Serang, 3) Mengkaji peran, dampak dan kebutuhan investasi subsektor perikanan tangkap dalam pembangunan wilayah Kota Serang, 4) Menentukan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di Kota Serang, 5) Menentukan strategi pengembangan perikanan tangkap di Kota Serang. Analisa dalam penelitian ini nenggunakan *Location Quotient (LQ)*, *Multiplier Effect (ME)* dan SWOT.

Dalam Penelitian ini didapatkan hasil, Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa berdasarkan indikator pendapatan daerah merupakan sektor basis dengan nilai LQ lebih besar dari 1, Berdasarkan hasil analisis *Multiflier Effect*, selama periode 2001-2008 dengan indikator pendapatan wilayah dan tenaga kerja, subsektor perikanan tangkap memberikan dampak positif terhadap pembangunan wilayah Kota Serang. Hasil analisis SWOT menghasilkan 3 alternatif strategi pembangunan antara lain, 1). Memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dengan memfokuskan pada komoditas hasil tangkapan unggulan, kesempatan kerja dan daya beli masyarakat yang cukup tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengembangan subsektor perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan; 2). Memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat membuka usaha di bidang perikanan untuk memenuhi permintaan pasar perikanan dari luar daerah maupun luar negeri; 3). Pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan tangkap yang bersifat komoditas unggulan sebagai langkah untuk dapat bersaing dengan pasar di luar daerah.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA/TAHU N/ JUDUL	TUJUAN/METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Meitha Konita Kaihatu (2013) dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Mendukung Perekonomian Wilayah Kabupaten	Tujuan: 1. Mengidentifikasi dan Menganalisis kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah kabupaten Maluku Tengah, 2. Mengetahui basis ekonomi sector perikanan dalam perekonomian wilayah kabupaten Maluku Tengah, 3. Menganalisis pola dan	1. Kontribusi sector perikanan atas dasar harga berlaku dan harga konstan menempatkan sector perikanan pada urutan. Peringkat kelima dan keenam dalam pembentukan PDRB. 2. Sector perikanan di Kabupaten Maluku Tengah bukan merupakan sector basis dengan pola dan struktur ekonimi yang sedang bertumbuh namun berada pada kondisi relative tertinggal dengan tingkat lokalisasinya yang

	<p>Maluku Tengah”</p>	<p>struktur pertumbuhan kabupaten Maluku Tengah.</p> <p>4. Mengetahui tingkat konsentrasi dan spesialisasi kegiatan sector perikanan dalam perekonomian kabupaten Maluku Tengah,</p> <p>5. Merumuskan alternative strategi pengembangan sector perikanan kabupaten Maluku Tengah.</p> <p>Metode Analisis Analisis <i>Shift Share</i>, <i>Location Quointent (LQ)</i> Analisis Tipologi Klassen, Analisis Aglomerasi, Analisis Spesialisasi dan Analisis SWOT</p>	<p>umumnya menyebar.</p> <p>3. Alternative strategi pengembangan sector perikanan adalah pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui konsentrasi dan spesialisasi kegiatan pembangunan perikanan, serta mengefektifkan kegiatan promosi investasi untuk meningkatkan kontribusi, pendapatan perkapita, dan mempercepat pertumbuhan sector perikanan.</p>
<p>2.</p>	<p>Dannu Idris (2014) “Strategi Peningkatan Peran Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Wilayah Provinsi Banten”</p>	<p>Tujuan:</p> <p>1) Mengkaji apakah sector perikanan mampu menyerap tenaga kerja di Provinsi Banten,</p> <p>2) Mengkaji strategi pengembangan sector perikanan agar dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten.</p>	<p>1. Berdasarkan analisis sektor basis, sector perikanan menjadi sector basis di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dari delapan wilayah di Provinsi Banten, lima wilayahnya memiliki keunggulan komparatif pada sector perikanan, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang.</p>

		<p>Metode Analisis:                  analisis sektor unggulan,                  analisis input output, dan                  analisis model ekonometrik</p>	<p>2. Berdasarkan analisis tabel input output tahun 2010, sektor perikanan di Provinsi Banten bukan merupakan unggulan. Hal ini terlihat dari struktur permintaan dan penawaran, struktur output, nilai tambah bruto dan permintaan akhir, sektor perikanan termasuk urutan dalam kelompok yang rendah.</p>
3	<p>Pusparani Rianti (2013), penelitian yang berjudul “Analisis Peranan Subsektor Perikanan Terhadap Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di kabupaten Blitar”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak sejalannya kenaikan produksi dan ketersediaan anggaran dan menganalisis peranan subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar</p> <p>Metode Analisis: nilai kontribusi, nilai LQ dan nilai shift share.</p>	<p>Dari penelitian ini didapatkan hasil, anggaran APBD, teknologi dan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Blitar. Ketika jumlah anggaran APBD yang didapat banyak, ditunjang oleh teknologi canggih dan sumber daya manusia yang baik maka PDRB Kabupaten Blitar juga akan meningkat. Menurut perhitungan, sektor basis di Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian, yang disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian. Subsektor perikanan Kabupaten Blitar sendiri merupakan subsektor basis kedua setelah subsector peternakan.</p>
4.	<p>Penelitian Anna kartina Ngamel dan Ida I Dewa Ayu Raka Susanti (2013) yang Berjudul “Peranan Sektor</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap pembentuka Produk Domestik Regional Bruto, untuk mengetahui basis</p>	<p>Dari Penelitian ini didapatkan hasil Berdasarkan hasil analisis <i>shift share</i>, besarnya nilai kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap <i>PDRB</i> di Kota Tual selama periode lima tahun pasca pemekaran wilayah yaitu tahun 2008-2012, menunjukkan nilai terbesar</p>

	<p>Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan wilayah Kota Tual, Provinsi Maluku”</p>	<p>ekonomi di Kota Tual, Maluku dan memberikan alternative strategi pembangunan sector kelautan dan perikanan. Metode Analisa : menghitung nilai kontribusi, nilai LQ, nilai shift share dan menggunakan analisis SWOT.</p>	<p>dibanding sector perekonomian lainnya. Sektor kelautan dan perikanan di Kota Tual berdasarkan hasil perhitungan analisis <i>LQ</i> merupakan sektor basis ekonomi, Penilaian terhadap analisis <i>SWOT</i> dalam memilih alternatif strategi pengembangan sector kelautan dan perikanan yang menjadi prioritas utama di Kota Tual, adalah: a) Meningkatkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha perikanan dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; b) Pengembangan manajemen professional dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; c) Pengembangan sistem <i>MCS</i> (<i>Monitoring, Controlling and Surveillance</i>) secara baik dan benar oleh instansi terkait kegiatan perikanan.</p>
<p>5.</p>	<p>Penelitian Siska Magnawati (2010) yang Berjudul “Strategi dan peranan Subsektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Wilayah Kota Serang”.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui keragaan perikanan tangkap di Kota Serang, 2) Mengetahui kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap PDRB dan kesempatan kerja di Kota Serang, 3) Mengkaji peran, dampak dan kebutuhan investasi subsektor perikanan tangkap dalam pembangunan wilayah Kota Serang, 4)</p>	<p>Dalam Penelitian ini didapatkan hasil, Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa berdasarkan indikator pendapatan daerah merupakan sektor basis dengan nilai LQ lebih besar dari 1, Berdasarkan hasil analisis <i>Multiflier Effect</i>, selama periode 2001-2008 dengan indikator pendapatan wilayah dan tenaga kerja, subsektor perikanan tangkap memberikan dampak positif terhadap pembangunan wilayah Kota Serang.</p>



		<p>Menentukan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di Kota Serang, 5) Menentukan strategi pengembangan perikanan tangkap di Kota Serang.</p> <p>Metode Analisa: <i>Location Quotient (LQ)</i>, <i>Multiplier Effect (ME)</i> dan SWOT</p>	<p>Hasil analisis SWOT menghasilkan 3 alternatif strategi pembangunan antara lain, 1). Memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dengan memfokuskan pada komoditas hasil tangkapan unggulan, kesempatan kerja dan daya beli masyarakat yang cukup tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengembangan subsektor perikanan tangkap secara terpadu dan berkelanjutan; 2). Memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat membuka usaha di bidang perikanan untuk memenuhi permintaan pasar perikanan dari luar daerah maupun luar negeri; 3). Pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan tangkap yang bersifat komoditas unggulan sebagai langkah untuk dapat bersaing dengan pasar di luar daerah.</p>
--	--	---	--

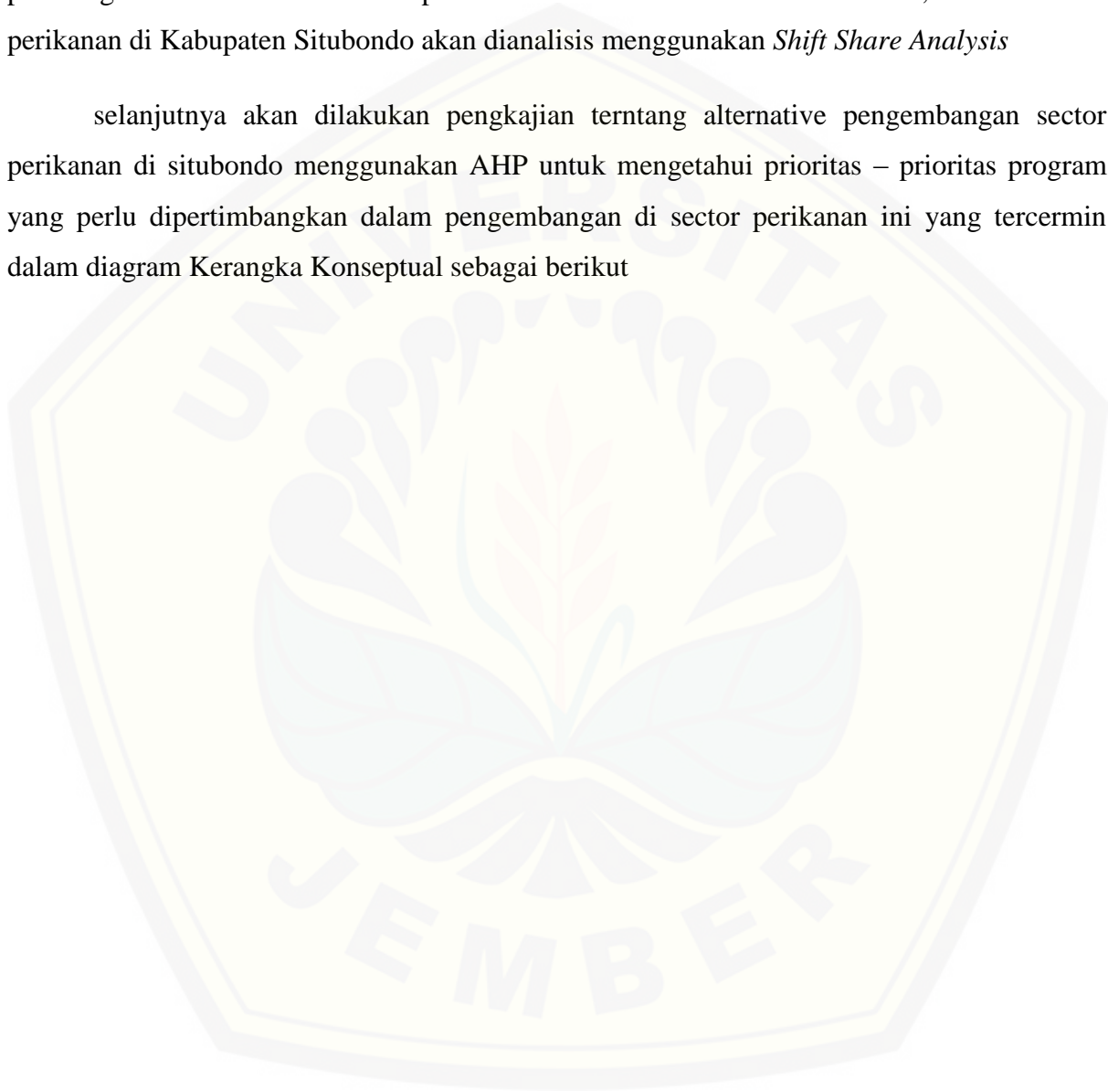
#### 2.4 Kerangka Konseptual

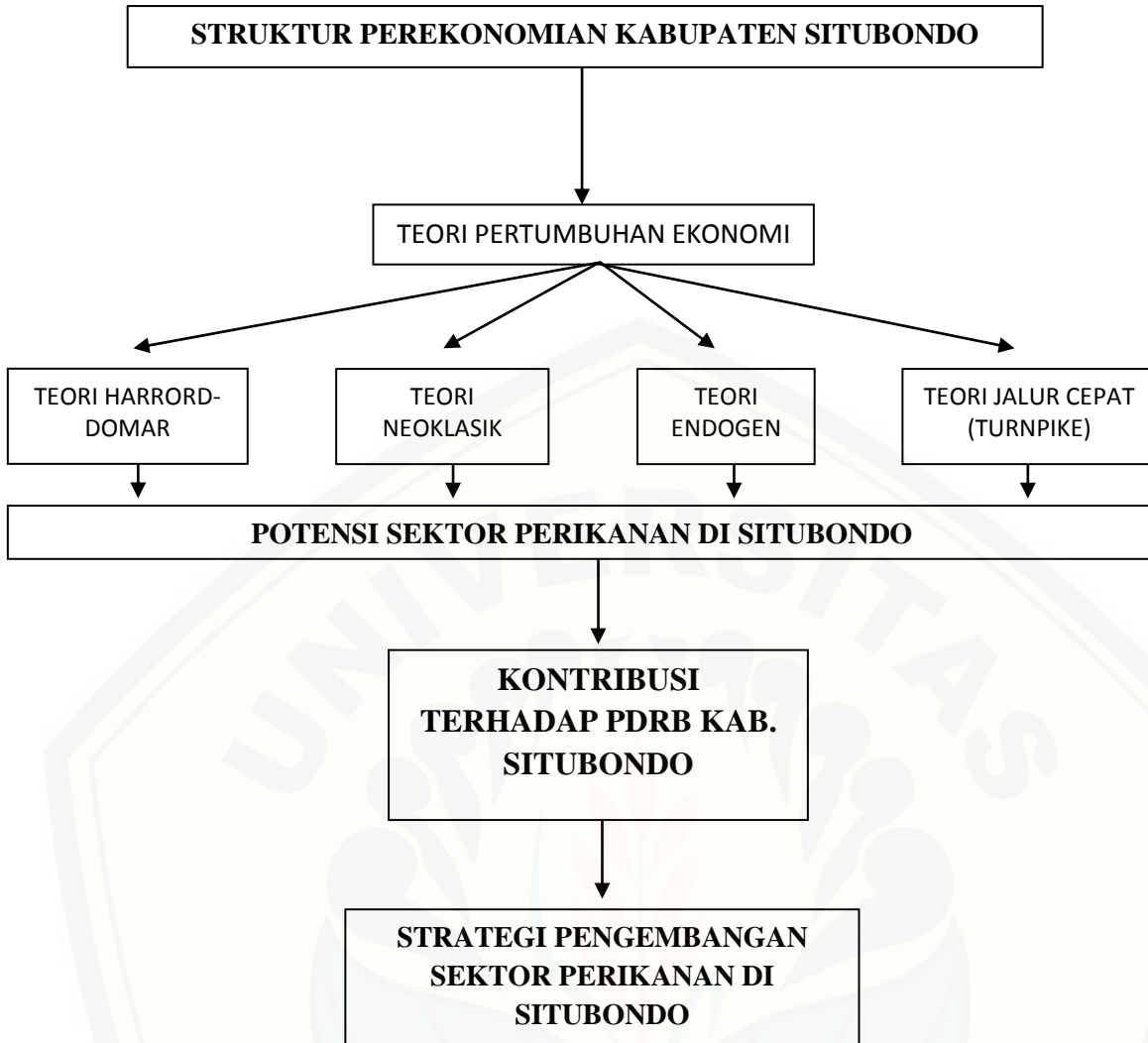
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat (Sularso dan Restianto, 2011). Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni: 1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru (teori Harold Domar), 2) pertumbuhan penduduk (Teori Neoklasikal dari Solow) 3) kemajuan teknologi

(teori pertumbuhan baru atau teori Endogen oleh Romer) dan 4) pengembangan sektor yang memiliki *competitive advantage* (Teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*)).

Begitu Juga dalam sector perikanan, terutama di Kabupaten Situbondo. Pesatnya pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk serta terbatasnya sumber daya alam di daratan, maka sumber daya kelautan dan perikanan menjadi potensi pembangunan ekonomi di Kabupaten Situbondo. Dalam Penelitian ini, Peran sector perikanan di Kabupaten Situbondo akan dianalisis menggunakan *Shift Share Analysis*

selanjutnya akan dilakukan pengkajian tentang alternative pengembangan sector perikanan di situbondo menggunakan AHP untuk mengetahui prioritas – prioritas program yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan di sector perikanan ini yang tercermin dalam diagram Kerangka Konseptual sebagai berikut





Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang ada di Kabupaten Situbondo berupa Data Sekunder yang meliputi data fasilitas-fasilitas (ekonomi, social, pemerintahan), jumlah penduduk, data Produk Domestik Regional Bruto, data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Situbondo dan data dari Bappekab Situbondo. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis data kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kontribusi (perkembangan) sektor perikanan dalam perekonomian wilayah. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Analisis yang dimaksud adalah deskripsi daerah penelitian, deskripsi tentang implikasi terhadap strategi kebijakan pembangunan wilayah dengan sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut, misalkan kegiatan ekonomi wilayah. Selain itu analisis kualitatif dapat berupa keadaan umum wilayah seperti pemerintahan, jumlah penduduk, tenaga kerja, potensi ekonomi, sistem sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian

#### 3.2. Metode Analisis Data

##### 3.2.1. *Shift Share Analysis*

Analisis Shift –Share digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor perikanan di Kabupaten Situbondo dengan membandingkan dengan wilayah yang lebih tinggi jenjangnya yaitu Propinsi Jawa Timur. Teknik ini memilih pertumbuhan sebagai perubahan suatu variabel wilayah dalam kurun waktu tertentu yang terdiri atas perubahan sebagai akibat dari pengaruh pertumbuhan wilayah di atasnya, bauran industri, serta keunggulan kompetitif atau persaingan. Pengaruh pertumbuhan dari daerah di atasnya disebut pangsa (share), pengaruh bauran industri disebut proporsional shift dan pengaruh keunggulan kompetitif (persaingan) disebut *differential shift* atau *regional share*.

Menurut Tarigan (2005) menyatakan Analisis Shift Share menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur sektor suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya yang meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah dalam kaitannya dengan perekonomian nasional

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh : pertumbuhan nasional (N), industri mix/ bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif ( C )

Menurut Prasetyo Soepomo (1993) bentuk umum persamaan dari analisis shift share dan komponen-komponennya adalah sebagai berikut :

- Dampak riil pertumbuhan ekonomi daerah

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \text{ dan } Y^*_{ij} - Y_{ij}$$

- Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi

$$N_{ij} = Y_{ij} \times r_n$$

- Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri

$$M_{ij} = Y_{ij}(r_{in} - r_n)$$

- Pengaruh keunggulan kompetitif / *Differential Shift*

$$C_{ij} = Y_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

$$r_{ij} = \frac{Y^*_{ij} - Y_{ij}}{Y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{Y^*_{in} - Y_{in}}{Y_{in}}$$

$$r_n = \frac{Y^*_n - Y_n}{Y_n}$$

Keterangan :

i = Sektor yang akan diteliti

$j$  = Variabel wilayah yang akan diteliti (Kabupaten Situbondo)

$n$  = Variabel nasional atau wilayah yang lebih tinggi jenjangnya (Propinsi Jawa Timur)

$D_{ij}$  = Perubahan sektor  $i$  di daerah  $j$

$N_{ij}$  = Pertumbuhan nasional sektor  $i$  di daerah  $j$

$M_{ij}$  = Bauran industri sektor  $i$  di daerah  $j$

$C_{ij}$  = Keunggulan kompetitif sektor  $i$  di daerah  $j$

$Y_{ij}$  = PDRB di sektor  $i$  daerah  $j$

$Y_{in}$  = PDRB di sektor  $i$  daerah di atasnya

$r_{ij}$  = laju pertumbuhan di sektor  $i$  daerah  $j$

$r_{in}$  = laju pertumbuhan di sektor  $i$  Nasional atau Wilayah yang lebih tinggi jenjangnya

$r_n$  = laju pertumbuhan ekonomi Nasional atau Wilayah yang lebih tinggi jenjangnya

### 3.2.2. *Analitycal Hierarchy Process (AHP)*

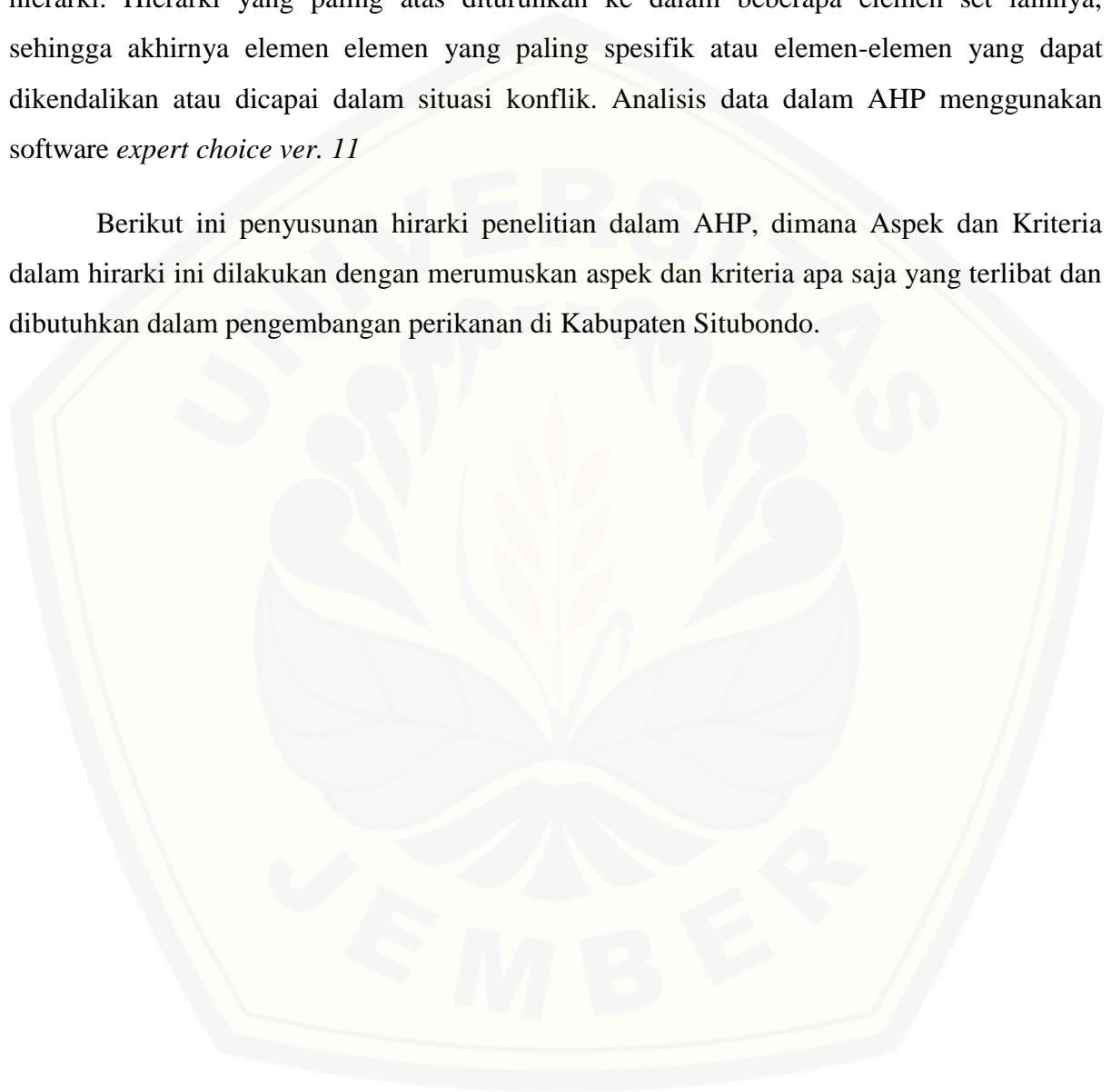
Penulis menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* pada penelitian ini. *Analytical Hierarchy Process (AHP)* adalah suatu proses “rasionalitas sistemik” yang memungkinkan untuk mempertimbangkan suatu persoalan sebagai satu keseluruhan dan mengkaji interaksi serempak dari berbagai komponennya di dalam suatu hirarki. AHP menangani suatu persoalan kompleks sesuai dengan interaksi-interaksi pada persoalan itu sendiri. Proses tersebut membuat orang dapat memaparkan sebagaimana kompleksitasnya persoalan itu sendiri dan memperluas definisi dan strukturnya melalui pengulangan.

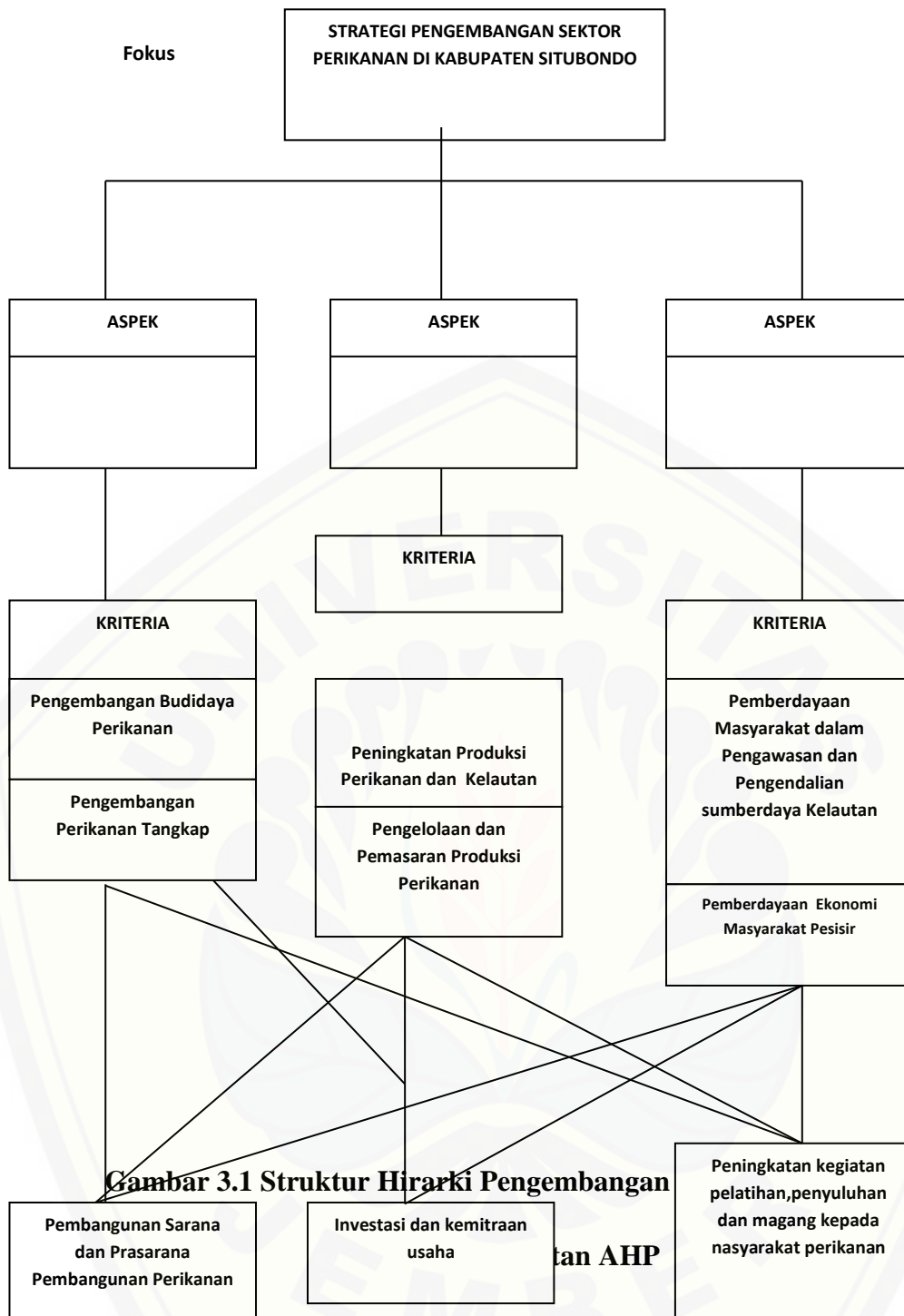
AHP adalah suatu metode analisis dan sintesis yang dapat membantu proses pengambilan keputusan yang *powerful* dan fleksibel. AHP dapat membantu dalam menetapkan prioritas-prioritas dan membuat keputusan di mana harus mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan AHP dapat mereduksi faktor-faktor yang kompleks menjadi sebuah rangkaian, kemudian mensintesa hasil-hasilnya, maka AHP tidak hanya membantu orang dalam memilih keputusan yang tepat, tetapi juga dapat memberikan pemikiran/ alasan yang jelas. AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau

tidak terstruktur ke dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki (Kusrini, 2007).

Data yang dikumpulkan dianalisis melalui *analytical hierarchy process (AHP)* dari Saaty (1991). Langkah awal dalam menggunakan *AHP* adalah merinci permasalahan ke dalam elemen elemennya, kemudian mengatur bagian dari elemen tersebut ke dalam bentuk hierarki. Hierarki yang paling atas diturunkan ke dalam beberapa elemen set lainnya, sehingga akhirnya elemen elemen yang paling spesifik atau elemen-elemen yang dapat dikendalikan atau dicapai dalam situasi konflik. Analisis data dalam *AHP* menggunakan software *expert choice ver. 11*

Berikut ini penyusunan hirarki penelitian dalam *AHP*, dimana Aspek dan Kriteria dalam hirarki ini dilakukan dengan merumuskan aspek dan kriteria apa saja yang terlibat dan dibutuhkan dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Situbondo.





Bentuk dan struktur hirarki dalam pembuatan prioritas kebijakan tersebut adalah:

1. Tingkat pertama adalah tujuan keputusan (Goal)  
 Dalam analisa ini yang menjadi tujuan (goal) dari penyusunan hirarki adalah strategi kebijakan pengembangan perikanan di Kabupaten Situbondo
2. Tingkatan kedua adalah aspek strategi kebijakan pengembangan perikanan di Kabupaten Situbondo yang terdiri dari 3 aspek yaitu:
  - a. Aspek Pemerintah



Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Situbondo, Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai posisi sebagai penggerak perekonomian di bidang kelautan dan perikanan dalam membudayakan dan mengembangkan masyarakat perikanan untuk menjadi mandiri. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia perikanan, penyediaan dan pengembangan teknologi perikanan dan kelautan serta pengawasan dan pengendalian terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan

## a.1. Kriteria Pengembangan Budidaya perikanan

ada 3 (tiga) macam budidaya perikanan yang terdapat di Kabupaten Situbondo, yakni Budidaya Tambak, Budidaya Air Tawar dan Budidaya Air Laut.

## a.2. Kriteria Pengembangan Perikanan Tangkap

potensi penangkapan berbagai jenis ikan pelagis dengan tangkapan utama ikan layang, ikan tongkol, ikan kembung dan ikan lemuru.

## b. Aspek Swasta

Sektor swasta juga memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam pembangunan sektor perikanan terutama di Kabupaten Situbondo akan tetapi Ketidakmampuan atau kelemahan sektor swasta melaksanakan fungsi kewirausahaan yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan. Pertumbuhan sektor perikanan di Situbondo merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dalam mendongkrak pembangunan perikanan adalah dengan membuka kemitraan yang seluas-luasnya dengan masyarakat dan pemerintah, sehingga terjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Terobosan atau inovasi-inovasi baru terhadap teknologi perikanan dan pemasaran hasil perikanan sangatlah memerlukan keterlibatan sektor swasta.

## b.1. Kriteria Peningkatan Produksi perikanan dan Kelautan

Sektor swasta mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan perikanan, dukungan swasta sebagai mitra nelayan dan petambak, dan juga sektor swasta diharapkan mampu melihat peluang bisnis di bidang perikanan di Kabupaten Situbondo. Sektor swasta diharapkan mampu meningkatkan nilai produksi dari sektor perikanan melalui pemafaatan teknologi dan optimalisasi modal dan jaringan yang dimiliki oleh sektor swasta.

## b.2. Kriteria Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan

Pengelolaan perikanan oleh swasta memang diperlukan, akan tetapi jika tidak diatur dengan ketat, maka pengelolaan perikanan yang berlebihan akan mematikan pengelolaan yang dilakukan oleh nelayan tradisional secara individual. Sektor swasta juga diperlukan perannya dalam pemasaran hasil perikanan di Situbondo, melalui peranan swasta maka diharapkan terjadi peningkatan mutu produk perikanan sehingga kualitas hasil perikanan di Situbondo meningkat.

## c. Aspek Masyarakat/ Pelaku Usaha

Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan di sektor perikanan yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi; tetapi juga faktor permintaan pasar dalam negeri atau luar negeri. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan sangatlah dibutuhkan karena bagaimanapun juga tujuan dari pembangunan sektor perikanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya Kelautan.

### c.1. Kriteria Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.

Kelangsungan produktifitas sumberdaya laut dan pesisir sangat di dukung oleh kondisi ekosistem pesisir yang baik dan alami yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan biota laut baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah pesisir. Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tersebut perlu dikelola secara terkoordinasi dan terpadu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Infra struktur wilayah pesisir sangat penting artinya untuk di maksimalkan dalam rangka mempermudah akses para nelayan baik dalam rangka mengoptimalisasi penangkapan maupun dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran hasil perikanan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pesisir yang berdaya dan produktif perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang efektif dan berkesinambungan baik berupa peningkatan sumberdaya manusia

### c.2. Kriteria Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang berdaya dan produktif perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang efektif dan berkesinambungan baik berupa peningkatan sumberdaya manusia. Kemiskinan masyarakat pesisir berakar kepada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif. Konsekuensinya, masyarakat pesisir terutama nelayan, kebutuhan permodalannya dipenuhi oleh para tengkulak, yang dalam kenyataannya tidak banyak menolong untuk meningkatkan kesejahteraan mereka demikian pula dengan kultur kewirausahaan yang masih sederhana.

Untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain maka digunakan pembobotan berdasarkan skala proses AHP yang disarankan oleh Saaty (1993) seperti pada Tabel 3.1. Dalam kondisi pembangunan yang makin kompleks analisis sistematis sangat diperlukan, bahkan sedapat mungkin faktor lain, seperti faktor politis harus dapat dijadikan bagian internal keseluruhan analisis. Dengan menggunakan metode AHP permasalahan yang kompleks tersebut akan dapat dirangkum sepenuhnya

**Tabel 3.1 Skala penilaian perbandingan**

<b>Intensitas Kepentingan</b>	<b>Definisi</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Kedua elemen sama pentingnya (Equal)	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama besarnya terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya ( <i>moderate</i> )	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
5	Elemen satu lebih penting dari pada elemen lainnya ( <i>strong</i> )	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen	Satu elemen yang kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek.

	lainnya ( <i>very strong</i> )	
9	Satu elemen mutlak penting dari pada elemen lainnya ( <i>extreme</i> )	Bukti yang mendukung elemen satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2,4,6,dan 8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan.
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka jika dibandingkan dengan aktivitas y maka j mempunyai nilai kebalikkannya dibanding dengan i.	

Prinsip-prinsip dasar menggunakan AHP yaitu :

- 1) Menyusun hierarki
- 2) Menetapkan prioritas dan
- 3) Konsistensi logis

### 3.3 Definisi Operasional

Variabel Harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dalam pengukurannya. Definisi operasional variabel adalah unsure penelitian yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang variabel variabel operasional sehingga dapat diamati atau diukur. Maka definisi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai\ dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Sektor perikanan meliputi penangkapan dan budidaya.
2. Peranan sektor perikanan dalam pembangunan adalah kedudukan sektor perikanan dalam pembangunan wilayah yang diukur berdasarkan indikator pendapatan wilayah dan tenaga kerja.

3. PDRB adalah pendapatan total suatu wilayah dan seluruh kegiatan perekonomian selama setahun. PDRB yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku yaitu PDRB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah, dengan PDRB ini dijadikan indikator untuk melihat pengaruh perubahan tingkat kemakmuran dan perekonomian termasuk inflasi. Selain itu digunakan PDRB per kapita yaitu perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga dengan PDRB per kapita dapat diketahui kemampuan wilayah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi. Satuan PDRB yang digunakan adalah jutaan rupiah.
4. Kontribusi Sektor merupakan besarnya sumbangan dari sektor perikanan di suatu wilayah terhadap perekonomian wilayah tersebut. Untuk mengetahui kontribusi sektor tersebut digunakan analisis *Shift Share* ( $D_{ij}$ )
5. Strategi pengembangan adalah langkah-langkah yang secara strategis menjadi dasar perencanaan untuk pengembangan yang dilakukan secara bertahap dan teratur dari kondisi riil saat ini menuju pada sasaran atau kondisi yang diinginkan

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Strategi Peningkatan Peran Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten Situbondo” dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Analisis shift share pada PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2009-2013 maka Provincial Share Situbondo antar sub-sektor dalam sektor Pertanian terjadi perbedaan yang cukup signifikan, dimana sub-sektor Tanaman Bahan Makanan tumbuh lebih cepat dengan 54,43% dan sub-sektor Perikanan tumbuh dengan porsi 11,42%. Berdasarkan nilai efek alokasi yang positif berarti sub-sektor perikanan merupakan salah satu sub-sektor penyumbang PDRB tetapi relatif kecil sehingga tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif lambat. Sektor perekonomian di Situbondo mempunyai alokasi PDRB yang kurang baik untuk sektor pertanian. Hal ini terlihat dari nilai total efek alokasi yang bernilai negatif, dan PDRB sektor pertanian tersebut belum terdistribusikan dengan baik di antara sub sektor yang ada maka sektor Perikanan di Kabupaten Situbondo merupakan sektor potensial yang masih perlu dikembangkan untuk memacu peningkatan PDRB
- 2) Strategi Pengembangan Perikanan di Kabupaten Situbondo berdasarkan analisis AHP antara lain pada aspek pertama, dalam hal ini aspek pemerintah, para responden berpendapat bahwa aspek ini merupakan prioritas dalam rangka pengembangan perikanan di kabupaten situbondo dengan nilai total bobot sebesar 0,688% aspek selanjutnya adalah aspek masyarakat yang merupakan prioritas kedua dengan nilai total bobot sebesar 0,199% dan aspek swasta yang merupakan aspek ketiga dalam pengembangan perikanan di kabupaten situbondo dengan bobot nilai 0,113%. Pada Aspek Pemerintah, Kriteria yang menjadi prioritas adalah Pengembangan budidaya perikanan dengan nilai 0,84% baru kemudian pengembangan perikanan tangkap. Sedangkan alternative dalam pengembangan perikanan di kabupaten situbondo berdasarkan aspek pemerintah adalah pembangunan sarana dan prasarana perikanan yang merupakan prioritas alternative ketiga dengan nilai 0.26%

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

- 1) Prioritas Pengembangan potensi perikanan yang melimpah di Kabupaten Situbondo lebih ditekankan pada pengembangan sub sektor budidaya melalui intensifikasi budidaya perikanan, baik itu budidaya perikanan laut ataupun budidaya perikanan darat. Intensifikasi budidaya perikanan dan teknologi paska panen berupa pengolahan hasil perikanan perlu dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan agar dapat meningkatkan produksi sektor perikanan yang berkelanjutan
- 2) Dalam hal perikanan tangkap, Pemerintah dan masyarakat hendaknya melakukan peningkatan pengawasan secara terpadu terhadap kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Sarana perikanan yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap juga perlu diperhatikan. Ketersediaan sarana perikanan bukan saja hanya akan memberikan kenyamanan kepada nelayan akan tetapi juga menjamin penanganan hasil tangkapan yang didaratkan sehingga memiliki kualitas yang tinggi yang pada akhirnya memiliki harga yang bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2000. **Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output**. Jakarta (ID): Central for Statistical Services.
- [DKP KAB. SITUBONDO] Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Situbondo. 2013. **Laporan Data Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014**. Situbondo: Dinas Kelautan dan Perikanan
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. **Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010 – 2014**. Jakarta (ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. **Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011**. Jakarta (ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- [PKSPL]. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – IPB. 2002. **Strategi Dasar Pembangunan Kelautan di Indonesia**. Bogor (ID): Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan dan P3O-LIPI.
- [PEMDA KAB. SITUBONDO] Pemerintah Daerah Kab. Situbondo. 2010 – 2014. **Situbondo Dalam Angka**. Situbondo: Pemerintah Daerah Kab. Situbondo
- Adi, P.H. 2007. **Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada kabupaten/kota se-jawa bali)**. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol 8, No 1
- Arsyad, L. 2004. **Ekonomi Pembangunan**. Edisi 4. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Arsyad, Lincoln, 1997, **Ekonomi Mikro**, BPFE, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Azis, Iwan. 1994. **Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia**, Jakarta, FE-UI
- Branch, Melville.1995. **Comprehensive City Planning Introduction and Explanation**. Terjemahan Wibison Bambang Hari. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dahuri R. 2003. **Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan**. Bahan Orasi Ilmiah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor (ID): Koleksi IPB
- Dahuri RJ, Rais SP, Ginting dan MJ Sitepu. 1996. **Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu**. Jakarta (ID): PT Pradnya Paramita. 88
- Damanhuri DS. 2000. **Paradoks Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Sektor Pertanian dan Perikanan (Visi serta Arah Kebijakan Reformasi dan Restrukturisasi Ekonomi Indonesia)**. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor (ID): Koleksi IPB.



- Daryanto A. dan Hafizrianda Y. 2010. **Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah : Konsep dan Aplikasi**. Bogor (ID): IPB Press.
- Djafar KS. 2004. **Sektor Perikanan Laut Dalam Perekonomian Provinsi Gorontalo [tesis]**. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Dumary.1997. **Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hermawan A. 2001. **Sektor Perikanan Laut Dalam Perekonomian Jawa Barat [tesis]**. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Idris, Dannu.2014. **Strategi Peningkatan Peran Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Wilayah Profinsi Banten**.Tesis. Sekolah PascaSarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Irawan dan Suparmoko. 1997. **Ekonomika Pembangunan**. BPFE. Yogyakarta
- Jhingan ML. 2004. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.
- Kaihatu, Monita Meitha.2013. **“Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Mendukung Perekonomian Wilayah Kabupaten Maluku Tengah”**. Tesis. Program Studi Ilmu Kelautan, Program Pasca Sarjana, Universitas Pattimura, Ambon.
- Kuncoro,Mudrajad, 1997, **Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan**, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Kusrini. 2007. **Strategi Perancangan dan Pengelolaan Basis Data**. Yogyakarta. ANDI
- Magnawati, Siska. 2010. **“Strategi dan peranan Subsektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Wilayah Kota Serang”**. Tesis. Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Instirut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mankiw, N. Greorgy. 2000. **Teori Makro Ekonomi**. Edisi Keempat. Alih Bahasa: Imam Nurmawam. Jakarta : Erlangga
- May, Hendarmini.1984. **Studi Pembagian Wilayah Administrasi sebagai Usaha Penunjang Pemerataan Pembangunan**. Dep. Planologi. ITB Bandung
- Mudzakir AK. 2008. **Peranan Sektor Perikanan Pada Perekonomian Jawa Tengah : Pendekatan Model Input Output**. *Jurnal Sainstek Perikanan Volume 4 No. 1, 2008 : 28 – 34*. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.
- Ngamel, Anna kartika dan Ida I Dewa Ayu Raka Susanti. 2013. **“Peranan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan wilayah Kota Tual, Provinsi Maluku”**.

Jurnal Sains Terapan Edisi III. Vol 3(1) 69-81. Program Studi Agribisnis Perikanan, Politeknik Perikanan Negeri Tual.

- Pracoyo TK dan Pracoyo A. 2007. **Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia**. Jakarta (ID): Grasindo
- Rinanti, Pusparani. 2013. **“Analisis Peraanan Subsektor Perikanan Terhadap Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di kabupaten Blitar”**. Jurnal Ilmiah. Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2011. **Perencanaan Pengembangan Wilayah**. Jakarta (ID): Yayasan Obor dan Crestpent Press.
- Saaty, T. Lorie. 1993. **Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks**.Pustaka Binama Pressindo.
- Sadono Sukirno.1994. **Pengantar Teori Mikroekonomi**, Raja Grafindo Persada. , Jakarta
- Solihin A. dan Lestari, N.A.2010. **Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah**. Majalah Ekonomi. XX(1), hal 20-34.
- Sriningsih. S. dan Yasin,M. 2009. **Dampak Dana Alokasi Umum (DAU)terhadap pemerataan fiskal kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat**. Majalah Ekonomi. XIX(2) hal 148-162.
- Sujarto, Djoko. 1991. **Perencanaan Kota dalam Kebijakan Perencanaan Kota di Indonsia**. Dep Planologi. ITB Bandung.
- Sukirno, Sadono. 1981. **Persoalan dalam Pembangunan Daerah**. FEUI. Jakarta
- Sukirno,Sadono,1985, **Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Bina Grafika, Jakarta.
- Sularso, H. dan Restianto, Y.E.2011. **Pengaruh Kinerja Keuangan TerhadapAlokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**. Media Riset Akuntansi. Vol 1, No 2 Agustus.
- Tarigan, Robinson, 2005. **Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi**. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C, 2004. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan**, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Tumada, La Ode Abdul Mirad.2012. **Analisis Strategis Kabupaten Muna. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik**, Jakarta. Tesis.
- Wedari, Sri.1987.**Pengantar Planologi**. Fakultas Teknik dan Perencanaan Universita 45. Ujung Pandang

Yunus, H.S. 2001. **Struktur Tata Ruang Kota**. Cetakan Kedua Oktober 2001. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.



## Lampiran 1 Kuisisioner AHP

### Petunjuk Pengisian Kuisioer

1. Penilaian (judgement) terhadap elemen elemen dari setiap level hirarki didasarkan atas bobot prioritas atau kepentingannya. Penilaian pada responden dinyatakan secara numeric (skala 1 sampai dengan 9) dengan definisi verbal sebagai berikut:

Intensitas Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya (Equal)	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama besarnya terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya ( <i>moderate</i> )	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
5	Elemen satu lebih penting dari pada elemen lainnya ( <i>strong</i> )	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya ( <i>very strong</i> )	Satu elemen yang kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek.
9	Satu elemen mutlak penting dari pada elemen lainnya ( <i>extreme</i> )	Bukti yang memdukung elemen satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2,4,6,dan 8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan.
kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka jika dibandingkan dengan aktivitas y maka j mempunyai nilai kebalikkannya dibanding dengan i.	

2. Proses penilaian kepentingan relative antara dua elemen tersebut dan berlaku aksioma reciprocal, artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibandingkan dengan elemen j maka elemen j harus sama dengan  $1/3$  kali lebih penting dibandingkan elemen i.
3. Jika elemen pada kolom sebelah kiri (kolom1) lebih penting dibandingkan dengan elemen sebelah kanan (kolom2), maka nilai perbandingan ditulis pada belahan sebelah kiri dan jika sebaliknya, maka ditulis di sebelah kanan

Responden No 01

Nama : .....

Instansi .....

Alamat/telp : .....

Tanggal pengisian: .....

1. Dari Beberapa Aspek berikut, manakah yang menurut saudara yang paling prioritas dalam rangka Pengembangan Perikanan di Situbondo? ( bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 sebelah kiri dengan beberapa aspek di kolom 2 sebelah kanan kemudian beri tanda silang **X**)

<b>Aspek Prioritas Kebijakan</b>	<b>9</b>		<b>7</b>		<b>5</b>		<b>3</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>5</b>		<b>7</b>		<b>9</b>	<b>Aspek Prioritas Kebijakan</b>
<b>Aspek Pemerintah</b>																		<b>Aspek Swasta</b>
<b>Aspek Pemerintah</b>																		<b>Aspek Masyarakat/Pelaku Usaha</b>

2. Untuk Aspek Pemerintah, Menurut saudara, manakah kriteria yang diprioritaskan pemerintah dalam rangka Pengembangan Perikanan di Situbondo? ( bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 sebelah kiri dengan beberapa aspek di kolom 2 sebelah kanan kemudian beri tanda silang **X**)



# Digital Repository Universitas Jember

Aspek Pemerintah	9		7		5		3		1		3		5		7		9	Aspek Pemerintah
<b>Pengembangan Budidaya Perikanan</b>																		<b>Pengembangan Perikanan Tangkap</b>
<b>Pengembangan Budidaya Perikanan</b>																		<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perikanan</b>
<b>Pengembangan Budidaya Perikanan</b>																		<b>Peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada masyarakat perikanan</b>
<b>Pengembangan Perikanan Tangkap</b>																		<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perikanan</b>
<b>Pengembangan Perikanan Tangkap</b>																		<b>Peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada</b>

																		masyarakat perikanan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

3. Untuk Aspek Swasta, Menurut saudara, manakah kriteria yang diprioritaskan pihak swasta dalam rangka Pengembangan Perikanan di Situbondo? ( bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 sebelah kiri dengan beberapa aspek di kolom 2 sebelah kanan kemudian beri tanda silang **X**)

<b>Aspek Swasta</b>	<b>9</b>		<b>7</b>		<b>5</b>		<b>3</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>5</b>		<b>7</b>		<b>9</b>	<b>Aspek Swasta</b>
<b>Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan</b>																		<b>Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>
<b>Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan</b>																		<b>Investasi dan kemitraan usaha</b>
<b>Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan</b>																		<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan</b>



<p><b>Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan</b></p>																		<p><b>Peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada masyarakat perikanan</b></p>
<p><b>Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b></p>																		<p><b>Investasi dan kemitraan usaha</b></p>
<p><b>Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b></p>																		<p><b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan</b></p>
<p><b>Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b></p>																		<p><b>Peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada masyarakat perikanan</b></p>

4. Untuk Aspek Masyarakat/Pelaku Usaha, Menurut saudara, manakah kriteria yang diprioritaskan pihak Masyarakat/Pelaku Usaha dalam rangka Pengembangan Perikanan di Situbondo? ( bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 sebelah kiri dengan beberapa aspek di kolom 2 sebelah kanan kemudian beri tanda silang **X**)

Aspek Masy/ Pelaku Usaha	9		7		5		3		1		3		5		7		9	Aspek Masy/ Pelaku Usaha
<b>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>																		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya Kelautan</b>
<b>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>																		<b>Investasi dan kemitraan usaha</b>
<b>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>																		<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan</b>
<b>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>																		<b>Peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada masyarakat perikanan</b>

<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya Kelautan</b>																		<b>Investasi dan kemitraan usaha</b>
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya Kelautan</b>																		<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan</b>
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya Kelautan</b>																		<b>Peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada masyarakat perikanan</b>

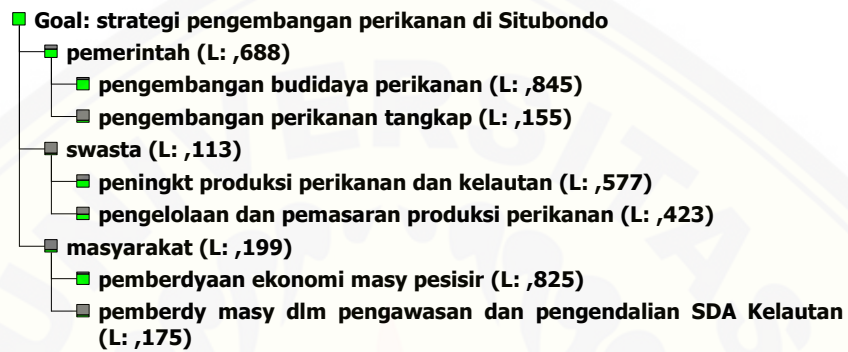
Lampiran 2 Hasil analisa AHP menggunakan *Expert Choice 11* (Tree View AHP)

13/11/2015 22:34:18

Page 1 of 1

Model Name: Hasil AHP strategi perikanan

Treeview



Alternatives

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan	,380
Peningkatan Investasi dan Kemitraan Usaha	,344
Peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada nelayan	,276

Lampiran 3 Hasil analisa AHP menggunakan *Expert Choice 11* (Priorities respect-AHP)

13/11/2015 22:36:4

Page 1 of 1

Model Name: Hasil AHP strategi perikanan

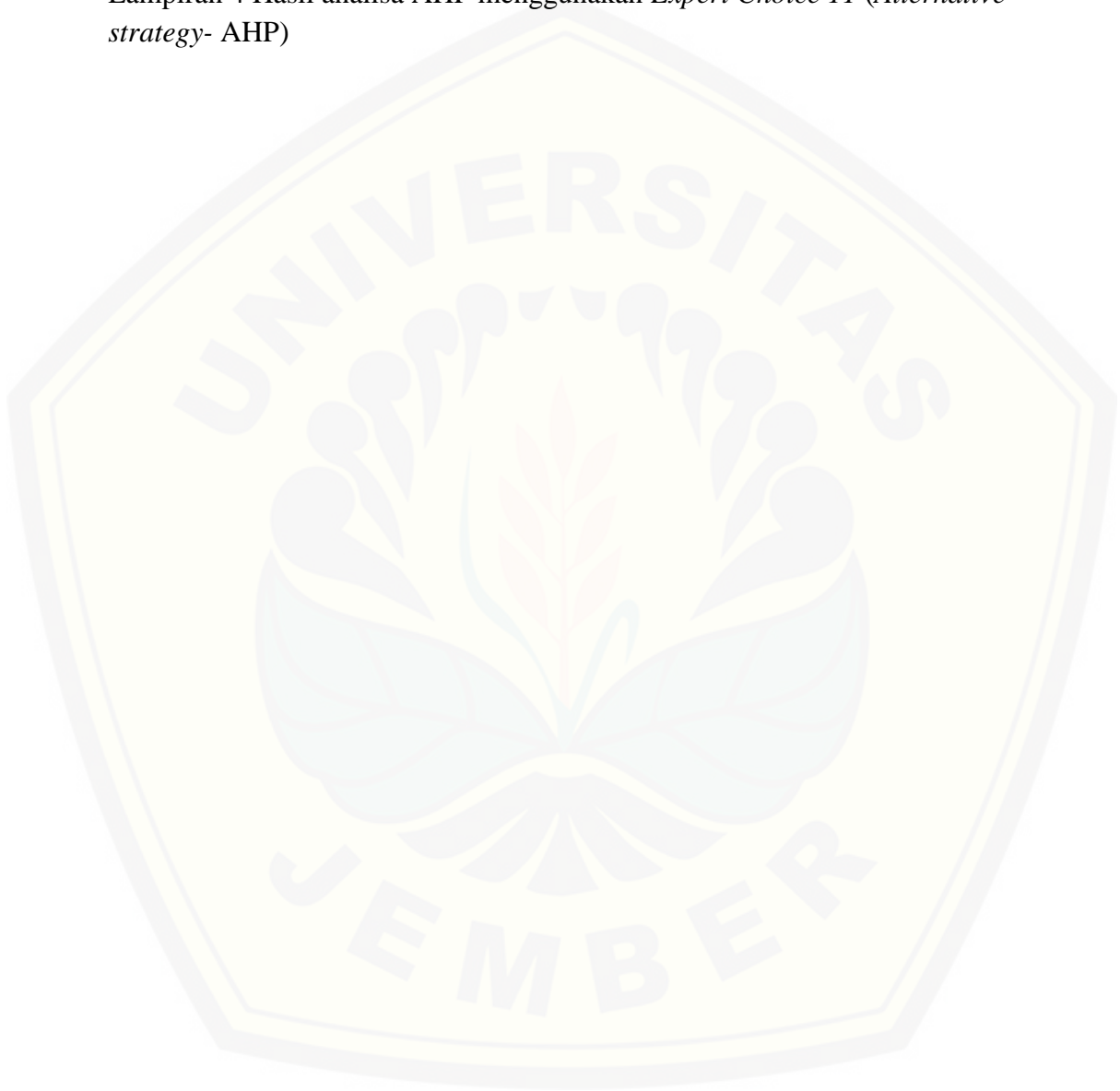
Priorities with respect to:  
Goal: strategi pengembangan perikanan di Situbondo

Combined



Inconsistency = 0,03  
with 0 missing judgments.

Lampiran 4 Hasil analisa AHP menggunakan *Expert Choice 11* (Alternative strategy- AHP)






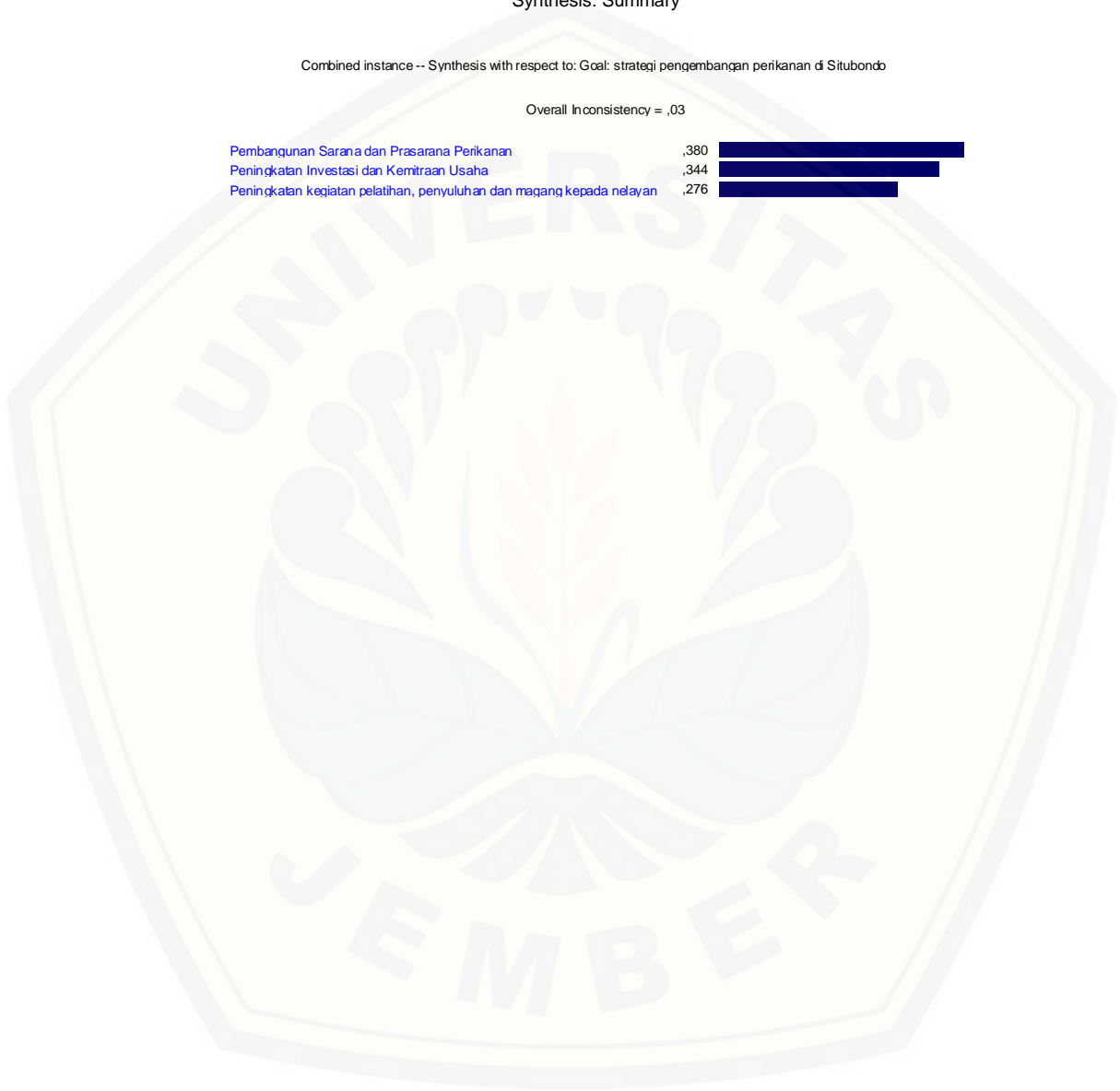
Model Name: Hasil AHP strategi perikanan

Synthesis: Summary

Combined instance -- Synthesis with respect to: Goal: strategi pengembangan perikanan di Situbondo

Overall Inconsistency = ,03

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan	,380	
Peningkatan Investasi dan Kemitraan Usaha	,344	
Peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada nelayan	,276	

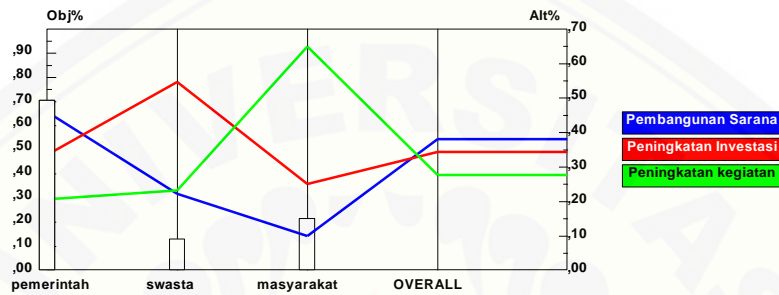


Lampiran 5 Hasil analisa AHP menggunakan *Expert Choice 11* (Graphic Strategy- AHP)

13/11/2015 22:28:51

Page 1 of 1

**Performance Sensitivity for nodes below: Goal: strategi pengembangan perikanan di Situbondo**



Objectives Names

pemerintah	pemerintah
swasta	swasta
masyarakat	masyarakat

Alternatives Names

Pembangunan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan
Peningkatan	Peningkatan Investasi dan Kemitraan Usaha
Peningkatan	Peningkatan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan magang kepada nelayan